

BAB II

PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KERJA SAMA SISTER PROVINCE DENGAN NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA

Bab ini akan membahas tiga subbab utama yang menjadi landasan penting dalam memahami konteks penelitian, yaitu: 1) kondisi umum wilayah NTB, termasuk letak dan luas geografis, luas wilayah, dan kondisi demografisnya; 2) gambaran pariwisata di NTB, mencakup potensi dan daya tarik serta akomodasi yang tersedia; dan 3) membahas kerja sama *sister province* yang telah dijalin oleh NTB dengan pemerintah setingkat di negara lain, termasuk bidang kerja sama yang menjadi fokus dan manfaat strategis yang diharapkan. Ketiga subbab ini bertujuan memberikan gambaran mengenai NTB sebagai latar belakang analisis kerja sama dengan NT.

2.1 Kondisi Umum Wilayah Provinsi NTB

2.1.1 Letak dan Luas Wilayah

NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah, dengan koordinat astronomis 8°10' hingga 9°05' Lintang Selatan dan 115°46' hingga 119°05' Bujur Timur. Secara geografis, posisi ini menjadikan NTB sebagai wilayah strategis yang menghubungkan Pulau Bali di sebelah Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di sebelah Timur, serta mengintegrasikannya ke dalam jaringan transportasi nasional dan internasional.

Provinsi ini mencakup wilayah seluas 19.675,89 km², yang secara administratif terbagi menjadi sepuluh kabupaten/kota. Pulau Lombok menaungi

lima kabupaten/kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sementara itu, Pulau Sumbawa juga terdiri dari lima kabupaten/kota, yakni Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah dengan cakupan geografis terbesar di NTB, mencapai 6.655,92 km² atau sekitar sepertiga dari total luas provinsi. Sebaliknya, Kota Mataram, yang merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat administratif dan ekonomi, memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya 60,42 km². Perbedaan yang signifikan antara luas wilayah kabupaten dan kota ini mencerminkan pola tata ruang yang beragam, di mana wilayah yang luas seperti Kabupaten Sumbawa didominasi oleh karakteristik rural dengan potensi pertanian, kehutanan, dan peternakan. Sebaliknya, Kota Mataram, meskipun kecil, memiliki kepadatan aktivitas yang tinggi sebagai pusat pemerintahan dan komersial.⁴⁰

2.1.2 Kondisi Geografis

Geografis Provinsi NTB ditandai oleh keberadaan dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang masing-masing memiliki karakteristik alam dan ekosistem yang unik. Pulau Lombok terkenal dengan keberadaan Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, yang memiliki peran vital sebagai sumber utama air bersih bagi penduduk setempat dan sekaligus menjadi destinasi pariwisata alam yang diakui secara global. Selain itu, pantai-pantai di Pulau Lombok, seperti Gili Trawangan, Kuta Mandalika, dan Senggigi, telah

⁴⁰ BPS Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024* (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024), hal. 3.

menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga berkontribusi signifikan terhadap sektor pariwisata NTB.

Sebaliknya, Pulau Sumbawa memiliki topografi yang lebih beragam, dengan dominasi lahan pertanian, perbukitan, dan wilayah pesisir. Pulau ini terkenal akan produk-produk unggulannya seperti madu hutan, garam, serta hasil laut yang mendukung sektor perikanan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan dan energi.

Secara eksternal, NTB berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah Utara, yang menjadi jalur perdagangan utama sekaligus kawasan perikanan yang penting. Di Selatan, provinsi ini berbatasan dengan Samudera Hindia, yang kaya akan potensi perikanan dan sumber daya kelautan lainnya. Selat Lombok di bagian Barat tidak hanya memisahkan NTB dari Bali, tetapi juga menandai Garis Wallace, batas ekologi yang signifikan dalam studi biogeografi, memisahkan flora dan fauna khas Asia dari Australasia. Sementara itu, di sebelah Timur, Selat Sape memisahkan NTB dari NTT dan menjadi jalur transportasi laut strategis sekaligus kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Komodo.

Keunggulan geografis ini menjadikan NTB sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor maritim, perikanan, perdagangan, serta pariwisata. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mitigasi risiko ekologis tetap menjadi perhatian penting dalam pembangunan wilayah ini.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

2.1.3 Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, Provinsi NTB memiliki jumlah penduduk sebesar 5.560.287 jiwa pada tahun 2023. Mayoritas penduduk, sekitar 71% atau 3.933.772 jiwa, menetap di Pulau Lombok. Konsentrasi populasi ini menegaskan peran strategis Lombok sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di NTB. Sebaliknya, Pulau Sumbawa yang memiliki luas wilayah lebih besar dihuni oleh populasi yang lebih sedikit, mencerminkan ketimpangan distribusi penduduk yang memengaruhi pola pembangunan.

Komposisi etnis di NTB juga menunjukkan keunikan tersendiri. Penduduk asli Pulau Lombok sebagian besar berasal dari suku Sasak, yang merupakan kelompok etnis mayoritas dengan tradisi budaya yang khas, seperti ritual *Bau Nyale* dan seni tradisional *Gendang Beleq* serta *Peresean*. Sementara itu, Pulau Sumbawa dihuni oleh suku Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta suku Dou Mbojo di Kabupaten Bima dan Dompu. Penduduk di wilayah Bima dan Dompu lebih lanjut terbagi menjadi subkelompok masyarakat Donggo Timur dan Donggo Barat, yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda.

Selain itu, NTB juga dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sumatra, dan NTT. Sebagian besar pendatang ini bermukim di wilayah pesisir, dengan profesi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan perikanan. Keberagaman etnis ini memberikan dinamika sosial yang kaya, di mana interaksi antar-suku dan antar-budaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis sekaligus dinamis.⁴²

⁴² *Ibid.*, hal. 39.

Namun, keberagaman demografi ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti pengelolaan disparitas sosial-ekonomi, pengembangan infrastruktur yang merata, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan potensi demografi sebagai modal sosial dapat menjadi kunci bagi NTB untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut data Badan Pusat Statistik NTB,⁴³ garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan yang konsisten selama periode 2019-2023. Pada Maret 2019, garis kemiskinan di wilayah perkotaan adalah Rp396.696 per kapita per bulan, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu Rp374.123. Di Maret 2023, angka ini meningkat menjadi Rp511.463 untuk perkotaan dan Rp485.682 untuk perdesaan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa standar kemiskinan meningkat seiring dengan perubahan harga kebutuhan dasar, termasuk pangan dan non-pangan, yang memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di NTB menunjukkan variasi antara perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 384,65 ribu orang, sementara di perdesaan terdapat 351,31 ribu orang, dengan total 735,96 ribu orang miskin di seluruh provinsi. Pada Maret 2023, jumlah tersebut meningkat sedikit menjadi 383,53 ribu orang miskin di perkotaan dan 367,7 ribu di perdesaan, dengan total 751,23 ribu orang miskin di NTB. Peningkatan ini mencerminkan dampak dari inflasi dan faktor-faktor sosial-

⁴³ *Ibid.*, hal. 202.

ekonomi lainnya, termasuk ketidaksetaraan pendapatan di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Secara nominal, jumlah penduduk miskin di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan karena garis kemiskinan yang lebih tinggi. Namun, meskipun angka kemiskinan nominal lebih tinggi di kota-kota besar seperti Mataram, wilayah perdesaan memiliki tantangan yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di perdesaan turut mempengaruhi ketimpangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan pentingnya kebijakan pembangunan yang memperhatikan perbedaan antara perkotaan dan perdesaan dalam menangani masalah kemiskinan di Provinsi NTB.

2.2 Gambaran Pariwisata di Provinsi NTB

2.2.1 Beberapa Potensi Pariwisata di Provinsi NTB

Menurut Laporan Tahunan Dinas Pariwisata NTB pada tahun 2021, sektor pariwisata telah menjadi andalan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan investasi di NTB. Jika mengesampingkan sektor pertambangan, pariwisata menempati posisi teratas dalam beberapa tahun terakhir, melampaui pertumbuhan investasi di sektor pertanian. NTB memiliki berbagai kawasan pariwisata strategis di Lombok dan Sumbawa yang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri pariwisata. Selain itu, kemudahan dalam proses perizinan juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan investasi di sektor pariwisata di provinsi ini.⁴⁴

⁴⁴ Dinas Pariwisata NTB, *Laporan Tahunan Dinas Pariwisata NTB Tahun 2021*, hal. 9.

Besarnya potensi pariwisata di NTB ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi provinsi ini pada tahun 2021. Kondisi ekonomi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 menunjukkan dampak positif dari pengembangan sektor pariwisata, dengan penambahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor terkait pariwisata, seperti penyediaan akomodasi dan makanan minuman, mencapai Rp 1.145,2 miliar dengan laju pertumbuhan sekitar 1,35%. Secara keseluruhan, PDRB Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp 140,15 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp 95,44 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, perekonomian Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,30% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang signifikan tercatat di sektor konstruksi, dengan angka mencapai 8,94%. Di sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 67,60%.

Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pariwisata di tahun 2021 sejalan dengan adanya penambahan nilai investasi di bidang pariwisata, terutama yang berasal dari investasi domestik. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Nilai Realisasi Investasi Bidang Pariwisata di NTB

No	Tahun	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Total Nilai Realisasi	%(+/-)
1	2019	1,840,003,268,613	1,088,214,867,228	2,928,218,135,841	
2	2020	769,024,365,885	694,145,315,315	1,463,169,681,200	-50,03
3	2021	652,896,873,144	2,361,030,370,153	3,013,927,243,297	105,99

Sumber: Dinas Pariwisata NTB, 2021

Beberapa kawasan pariwisata yang telah menjadi pusat perhatian bagi para investor meliputi Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara, Pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di

Kabupaten Lombok Tengah.⁴⁵ Berikut penjelasan singkat dari Kawasan yang dimaksud:

1. KEK Mandalika

Kawasan ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan berfungsi sebagai pendorong utama bagi sektor pariwisata. Dengan luas sekitar 1.035,67 hektar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memiliki pantai berpasir putih yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Lokasinya yang strategis menjadikan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pembangunan KEK Mandalika melibatkan investasi yang cukup signifikan, dengan total investasi diperkirakan mencapai 2,2 triliun untuk infrastruktur, dan 28,6 triliun dari pihak pelaku usaha. Diperkirakan bahwa KEK Mandalika akan menarik sekitar 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025 dan dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata sebesar 16,96 triliun.

2. Kawasan Senggigi

Kawasan Wisata Senggigi mencakup dua desa, yaitu Desa Senggigi dan Desa Batulayar Barat. Desa Senggigi terdiri dari beberapa dusun, termasuk Dusun Loco, Dusun Senggigi, Dusun Kerandangan, Dusun Mangsit, Dusun Batubolong, dan Dusun Melase, yang terletak di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, kawasan ini dibatasi oleh Selat Lombok di sebelah Barat, Desa Senteluk dan Desa Sandik di sebelah Selatan, Desa

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 9.

Lembah Sari di sebelah Timur, serta Desa Malaka di Kecamatan Pemenang (Kabupaten Lombok Utara) di sebelah Utara.

Dari segi geografis, kawasan wisata Senggigi merupakan desa yang terletak di antara Pantai Senggigi di sebelah Barat dan Bukit Senggigi di sebelah Timur. Wilayah pesisirnya membentang dari arah Utara ke Selatan dan memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan mencapai 2.600 mm. Luas wilayah kawasan ini mencapai 15,21 km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2010 mencapai 577 jiwa. Sebagian besar wilayah ini digunakan untuk keperluan akomodasi pariwisata, pertanian, perkebunan, hutan lindung, serta perumahan.

3. Kawasan Gili Trawangan

Gili Trawangan adalah bagian dari kawasan Gili Indah yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan pariwisata taman wisata alam laut (TWAL) melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 1989, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 1989. Penetapan Pulau Gili sebagai taman wisata alam laut didasarkan pada keunikan keindahan alam lautnya, termasuk keberadaan populasi karang biru (*blue coral*). Meskipun Gili Trawangan memiliki potensi alam bahari yang sangat besar, pengembangannya sebagai daya tarik wisata unggulan, yang berfokus pada pariwisata alternatif, belum dimanfaatkan secara maksimal.

2.2.2 Jumlah Akomodasi Pariwisata di NTB

Akomodasi yang tersedia di NTB terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis akomodasi yang tersedia di NTB.

A. Hotel Berbintang

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik NTB⁴⁶ mencatat 96 akomodasi berupa hotel berbintang yang menyediakan 6.626 kamar dan 9.766 tempat tidur. Sebagian besar fasilitas akomodasi terkonsentrasi di wilayah Pulau Lombok, khususnya di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kota Mataram, sementara wilayah Sumbawa masih menunjukkan perkembangan yang lebih lambat.

Hal ini menunjukkan bahwa Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara merupakan tiga wilayah utama yang menjadi pusat pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lombok Barat, dengan 26 akomodasi, 1.708 kamar, dan 2.355 tempat tidur, terkenal dengan kawasan Senggigi serta destinasi pantai dan resor mewah yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Sementara itu, Lombok Tengah menunjukkan perkembangan pesat di KEK Mandalika, yang mendorong peningkatan jumlah akomodasi menjadi 12 dengan 964 kamar dan 1.347 tempat tidur, berkat berbagai acara internasional seperti MotoGP. Lombok Utara, dengan daya tarik wisata laut di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, menawarkan 25 akomodasi, 1.149 kamar, dan 1.307 tempat tidur, menjadikannya destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun internasional.

Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi mencatat angka tertinggi dalam jumlah kamar (2.478) dan tempat tidur (4.258) dengan 26 akomodasi. Kota ini berfungsi sebagai pusat administratif, bisnis, dan transit, sehingga menjadi hub utama bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Di sisi lain, Lombok Timur, meskipun memiliki potensi wisata seperti Taman Nasional Gunung Rinjani, hanya memiliki

⁴⁶ BPS Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024*, Loc.Cit., hal. 397.

1 akomodasi dengan 11 kamar dan tempat tidur. Wilayah ini masih belum menjadi pusat pengembangan pariwisata yang signifikan. Kabupaten Sumbawa mencatat adanya peningkatan kapasitas penginapan dengan 4 akomodasi, 126 kamar, dan 199 tempat tidur, meskipun pengembangan pariwisata di wilayah ini masih berjalan lambat dibandingkan Lombok.

Kabupaten Dompu belum memiliki data akomodasi yang tercatat, menunjukkan tantangan besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Kota Bima mulai menunjukkan upaya peningkatan dengan 1 akomodasi, 115 kamar, dan 164 tempat tidur. Sementara itu, Sumbawa Barat hanya memiliki 1 akomodasi dengan 75 kamar dan 125 tempat tidur. Potensi wisata di wilayah ini, seperti Taman Nasional Tambora dan Pulau Kenawa, belum sepenuhnya didukung oleh pengembangan akomodasi yang memadai, sehingga masih memerlukan perhatian untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa distribusi akomodasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mencerminkan ketimpangan yang signifikan. Pulau Lombok, khususnya wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram, mendominasi dalam jumlah fasilitas akomodasi. Sementara itu, wilayah Sumbawa secara umum masih memiliki infrastruktur penginapan yang minim.

Wilayah Lombok Tengah dan Kota Mataram menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama didorong oleh peran strategis KEK Mandalika dan status Kota Mataram sebagai pusat administratif dan komersial. Sebaliknya, wilayah seperti Lombok Timur, Dompu, dan Sumbawa Barat membutuhkan perhatian lebih untuk mengembangkan potensi wisata yang belum tergarap.

B. Hotel Non-Bintang

Pada tahun 2023, Provinsi NTB mencatat total 796 akomodasi hotel non-bintang, yang menyediakan 8.627 kamar dan 12.506 tempat tidur. Angka ini menunjukkan keberagaman kapasitas akomodasi di berbagai kabupaten/kota, dengan kontribusi dominan dari daerah-daerah di Pulau Lombok, terutama Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Sebaliknya, wilayah di Pulau Sumbawa, meskipun menunjukkan peningkatan kapasitas, masih berada di bawah Pulau Lombok dalam hal jumlah fasilitas penginapan.⁴⁷

Menurut data ini, Pulau Lombok memiliki jumlah hotel non-bintang dengan kamar dan tempat tidur yang beragam di setiap kabupatennya. Lombok Barat tercatat memiliki 63 hotel non-bintang dengan 815 kamar dan 927 tempat tidur, sedangkan Lombok Tengah memiliki 188 hotel non-bintang dengan 1.256 kamar dan 1.829 tempat tidur. Lombok Timur mencatat 80 hotel non-bintang dengan 618 kamar dan 871 tempat tidur, sementara Lombok Utara menjadi wilayah dengan jumlah hotel non-bintang terbanyak di NTB, yaitu 199 unit dengan 1.614 kamar dan 1.801 tempat tidur. Kota Mataram, sebagai ibu kota, memiliki 123 hotel non-bintang dengan 2.232 kamar dan 3.784 tempat tidur yang mendukung aktivitas pariwisata dan bisnis di kawasan tersebut.

Di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa memiliki 42 hotel non-bintang dengan 764 kamar dan 1.196 tempat tidur, sedangkan Dompu mencatat 33 unit dengan 387 kamar dan 581 tempat tidur. Kabupaten Bima memiliki 8 hotel non-bintang dengan 110 kamar dan 146 tempat tidur, sementara Kota Bima memiliki 20

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 404.

unit dengan 469 kamar dan 831 tempat tidur. Sumbawa Barat mencatat 40 hotel non-bintang dengan 362 kamar dan 540 tempat tidur, menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Dengan demikian, Pulau Lombok mendominasi dalam jumlah fasilitas akomodasi dan kapasitasnya. Wilayah Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kota Mataram menjadi kontributor utama, mencerminkan fokus pengembangan pariwisata di sekitar destinasi utama seperti Gili Trawangan, Mandalika, dan Kota Mataram. Sebaliknya, Pulau Sumbawa masih menunjukkan ketertinggalan, meskipun ada pertumbuhan di Kabupaten Sumbawa dan Dompu.

2.3 Kerja Sama *Sister Province* antara Provinsi NTB dan Pemerintah Setingkat di Negara Lain.

Provinsi NTB telah melakukan beberapa kerja sama dengan beberapa pemerintah setingkat di negara lain dalam bentuk *sister province*. Beberapa dari kerjasama yang dimaksud sebagai berikut:

2.3.1 Kerja Sama dengan Bukhara, Uzbekistan

Salah satu inisiatif kerja sama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Provinsi NTB adalah kolaborasi dengan Bukhara, sebuah provinsi yang terletak di wilayah Uzbekistan, dalam upaya pengembangan sektor pariwisata halal. Uzbekistan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, memiliki jumlah Muslim yang signifikan, yang mengindikasikan adanya minat dan potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Bukhara, salah satu provinsi di Uzbekistan, dikenal sebagai pusat pengembangan pariwisata halal, terutama karena kekayaan situs religiusnya yang bersejarah.

Fokus utama pengembangan sektor pariwisata halal di Bukhara adalah wisata religi, yang mencakup kegiatan ziarah ke makam dan situs bersejarah yang memiliki signifikansi bagi umat Islam. Dengan banyaknya situs religius yang menarik, Bukhara menawarkan peluang besar untuk mengembangkan pengalaman pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, kerja sama paradiplomasi antara Bukhara dan NTB bertujuan untuk memperkuat industri pariwisata halal di kedua provinsi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata halal di NTB, serta memperluas jaringan internasional dalam bidang pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya.⁴⁸

Kesamaan dalam kultur budaya Islam dan potensi pariwisata yang signifikan merupakan salah satu faktor pendorong utama terjalannya kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam upaya pengembangan sektor pariwisata halal. Penandatanganan LoI yang menandai kerja sama antara pemerintah Provinsi NTB dan Uzbekistan berlangsung di Mataram pada tanggal 24 Juni 2019. Acara ini dihadiri oleh Ibu Sitti Rohmi selaku Wakil Gubernur NTB dan Khakimov yang menjabat sebagai Wakil Direktur Pertama Departemen Regional Provinsi Bukhara.⁴⁹

2.3.2 Kerja Sama dengan Kujawsko-Promorskie, Polandia

Mekanisme *sister province* antara NTB dan Kujawsko-Pomorskie telah mengidentifikasi sektor pendidikan sebagai fokus utama untuk memperkuat

⁴⁸ Nadiyah Kholilah Yahya, "Institusionalisasi Kerja sama Paradiplomasi NTB dengan Bukhara dalam Membangun Sektor Pariwisata Halal" (Universitas Islam Indonesia, 2022), hal. 3.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 4.

hubungan antarprovinsi. Sejak tahun 2018, pemerintah NTB telah secara konsisten mengirimkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan tingkat sarjana dan pascasarjana di sejumlah universitas di Kujawsko-Pomorskie, Polandia. Tujuan dari pengiriman mahasiswa ini bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan akademik mereka, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara kedua daerah melalui pertukaran pengetahuan dan budaya.

Inisiatif pendidikan ini menjadi salah satu prioritas utama Gubernur NTB yang terpilih, Zulkieflimansyah. Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan “1000 Cendekia,” yang mencerminkan dedikasinya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia di wilayahnya. Melalui program ini, Zulkieflimansyah berambisi untuk menghasilkan generasi yang terdidik dan berkualitas, yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.⁵⁰

Untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan ini, pemerintah Nusa Tenggara Barat secara aktif mengumpulkan semua sumber daya yang diperlukan setiap tahun, dengan memanfaatkan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan. Dengan menggunakan dana CSR tersebut, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan program pendidikan ini, sehingga memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di luar negeri, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama internasional antara NTB dan Kujawsko-Pomorskie. Secara keseluruhan, inisiatif

⁵⁰ *Loc.Cit.*, hal. 228.

ini mencerminkan komitmen NTB untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas.⁵¹

2.3.3 Kerja Sama dengan Zhejiang, Tiongkok

Kerja sama ini dimulai sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk memperluas dan mengeksplorasi peluang kerja sama dengan beberapa provinsi di Indonesia, terutama dengan Provinsi NTB. Pada tahun 2014, kedua provinsi tersebut menandatangani kesepakatan kerja sama *Sister Province* antara NTB dan Provinsi Zhejiang di Tiongkok. Sebelumnya, Provinsi Zhejiang telah menjalin MoU dengan Provinsi Banten pada tahun 2010, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat yang menyepakati kerja sama pada tahun 2013. Selain itu, Provinsi Bali dan NTT juga telah menandatangani MoU yang dilanjutkan dengan kesepakatan teknis mengenai investasi.⁵²

Provinsi Jawa Timur bahkan telah membahas bidang kerja sama ini sejak tahun 2012, ketika pemerintah Provinsi Zhejiang, termasuk Ketua DPRD-nya, Mrs. Qiao Chuanxiu, melakukan kunjungan ke Jawa Timur. Lebih lanjut, Jawa Timur berfokus pada penguatan kerja sama di sektor pertanian dan perikanan, selain sektor perdagangan dan industri. Provinsi ini berkeinginan untuk meniru keberhasilan Provinsi Zhejiang dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya hingga mencapai 15.000 dolar AS. Oleh karena itu, untuk mempelajari strategi yang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 229.

⁵² A Sibawaihi, "Proses Pengambilan Keputusan Pemprov NTB Membangun Kerja sama Sister Province dengan Pemprov Zhejiang RRT (2014-2015)," dalam *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hal. 120–29 (hal. 125) <<https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/16-assazali.pdf>>.

berhasil diterapkan di Zhejiang, Jawa Timur secara aktif mengirimkan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) ke provinsi tersebut.

Dalam konteks ini, Provinsi NTB menjalin kerja sama dengan Provinsi Zhejiang dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua pemerintah provinsi serta mengembangkan kerja sama di berbagai sektor. NTB memiliki luas wilayah, potensi sumber daya alam yang melimpah, dan banyak peluang investasi. Dengan demikian, NTB berpotensi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik lebih banyak perusahaan dari Tiongkok untuk berinvestasi. Sektor pertanian dan perikanan menjadi area yang sangat menjanjikan untuk kerja sama antara Provinsi Zhejiang dan NTB, di samping sektor pariwisata, transportasi, industri, perdagangan, serta kerja sama di bidang pendidikan dan budaya.⁵³

2.3.4 Kerja Sama dengan Northern Territory of Australia

Kerja sama *sister province* antara NTB dan NT mencerminkan upaya strategis untuk mempererat hubungan internasional melalui pendekatan paradiplomasi. Kolaborasi ini berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pengembangan ekonomi, pengembangan sektor peternakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama di berbagai bidang ini diharapkan dapat menguntungkan bagi NTB. Dalam sektor peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB. Sementara itu, pada sektor pariwisata, NTB mendapat manfaat dari pengalaman NT dalam pengelolaan

⁵³ *Ibid.*

destinasi wisata kelas dunia, memungkinkan perluasan daya tarik wisata di pasar internasional. Kerja sama ini juga memperkuat kapasitas teknis NTB dalam pemasaran global dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.⁵⁴

Di sektor ekonomi, kolaborasi ini menekankan peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur, khususnya di bidang agribisnis dan peternakan. NT, dengan keunggulan teknologi dan pengalaman di bidang pengelolaan sumber daya alam, menjadi mitra strategis bagi NTB dalam meningkatkan efisiensi sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, kerja sama ini mencakup pengelolaan risiko bencana. Mengingat kerentanan NTB terhadap gempa bumi dan bencana lainnya, NT memberikan dukungan berupa transfer teknologi dan keahlian untuk memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis data, meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah tersebut.

Dimensi sosial dan budaya juga menjadi pilar penting dalam hubungan ini. Pertukaran seni dan budaya menciptakan ruang dialog lintas budaya yang mempererat hubungan antarindividu. Program seperti festival seni, pelatihan keterampilan, dan kunjungan resmi memungkinkan NTB mempromosikan warisan budayanya, termasuk seni tenun Sasak dan tradisi Lombok, sementara NT dapat memperkenalkan seni Aborigin yang kaya akan nilai sejarah. Interaksi ini memperkuat hubungan inklusif dan menciptakan landasan kokoh bagi kolaborasi jangka panjang.⁵⁵

⁵⁴ NTBSatu, “‘Sister Province’ Provinsi NTB dengan NT Australia Dinilai sebagai Langkah Baik Merespon Kemajuan Zaman,” 2022 <<https://ntbsatu.com/2022/03/31/sister-province-provinsi-ntb-dengan-nt-australia-dinilai-sebagai-langkah-baik-merespon-kemajuan-zaman.html>> [diakses 15 November 2024].

⁵⁵ Saputra, “NTB dan Australia Utara Jalin Sister City, Begini Targetnya.”

Kerja sama ini juga menciptakan peluang inovasi baru dalam pengelolaan kawasan berbasis potensi lokal. Sebagai contoh, sektor pariwisata ekologis NTB dapat memanfaatkan pengetahuan NT terkait pengelolaan destinasi yang berwawasan lingkungan. Inisiatif ini mencakup pengelolaan taman laut, promosi kawasan konservasi, serta penerapan standar ramah lingkungan dalam industri pariwisata. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik wisatawan asing tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem NTB. Dengan demikian, hubungan NTB dan NT tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

Dukungan dari pemerintah pusat kedua negara menjadi elemen penting dalam memperkuat kerja sama ini. Pemerintah Indonesia dapat berperan dengan menyediakan regulasi yang mendukung hubungan antarprovinsi, sementara Pemerintah Australia dapat memberikan insentif investasi untuk sektor-sektor strategis. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja sama yang lebih solid dan berkelanjutan.⁵⁶

Keberhasilan kerja sama ini juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Di NTB, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, seperti melalui program desa wisata, akan memberikan manfaat langsung kepada komunitas setempat. Sementara itu, di NT, masyarakat lokal dapat berkontribusi melalui promosi budaya dan penyediaan jasa wisata. Dengan melibatkan masyarakat, kerja sama ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memberdayakan komunitas lokal di kedua wilayah.

⁵⁶ *Ibid.*

Sebagai kesimpulan, kerja sama *sister province* antara NTB dan NT merupakan model kolaborasi lintas negara yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat di berbagai sektor. Meskipun potensi besar ini juga disertai sejumlah tantangan, sinergi yang kuat antara kedua wilayah, dukungan pemerintah, dan pelibatan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini. Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, hubungan NTB dan NT dapat menjadi contoh bagaimana paradiplomasi dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus mempererat hubungan internasional.⁵⁷



⁵⁷ NTBSatu, “‘Sister Province’ Provinsi NTB dengan NT Australia Dinilai sebagai Langkah Baik Merespon Kemajuan Zaman.” *Loc. Cit.*